

# RENJA DISHUB KOTA DUMAI TAHUN ANGGARAN 2026





# WALIKOTA DUMAI

PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI  
NOMOR 60 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KOTA DUMAI TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 55 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2026, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Dumai tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);

4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 1 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2025 Nomor 8 Seri D);
11. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 13 Seri D).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2026.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Dumai.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah memuat penjabaran dari Visi, Misi, Kebijakan dan Program Walikota untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2021 - 2026.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) Tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencanapendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

### BAB II KETENTUAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah beserta matrik Program Prioritas Perangkat Daerah Tahun 2026 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2026 yang dihitung mulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember 2026.

- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah. Prioritas pembangunan daerah, Rencana Kerja dan kerangka pendanaan indikatif tahun 2026.
- (3) Renja Kerja Perangkat Daerah tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
  - a. salah satu bahan penyusunan Rancangan KUA/PPAS, khususnya Program/ Kegiatan yang tercantum dalam RKPD Kota Dumai tahun 2026;
  - b. bahan bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026, setelah tercantum dalam KUA/PPAS.
- (4) Penyajian Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud disusun dengan sistematika sebagai berikut :
  - a. BAB I : Pendahuluan;
  - b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
  - c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
  - d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
  - e. BAB V : Penutup.
- (5) Penjabaran Renja tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

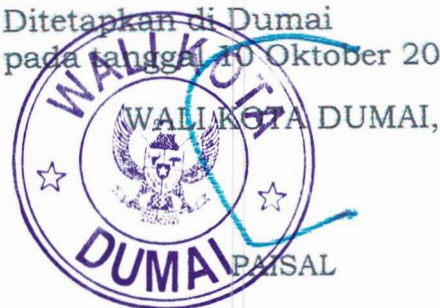
BAB III  
PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 10 Oktober 2025



Diundangkan di Dumai  
pada tanggal 10 Oktober 2025



BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2025 NOMOR 36 SERI 0



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya serta menuntun dan membimbing kita sehingga Dinas Perhubungan Kota Dumai dapat menyelesaikan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun Anggaran 2026

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Dumai merupakan penjabaran dari Dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2025 - 2029, dimana kedua dokumen tersebut (Renja dan Renstra) mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2026 serta mendasarkan pada RPJMD Kota Dumai Tahun 2025 - 2029 dan RPJPD Kota Dumai Tahun 2025-2045. Selain itu dokumen lain yang dijadikan perhatian dalam penyusunan adalah RPJMN Tahun 2025-2029 dan Proyek Strategis Nasional dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Renja Dinas Perhubungan Kota Dumai berfungsi sebagai pedoman dan rujukan dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2026, dimana pencapaian sasaran pembangunan yang direncanakan tetap memperhatikan sinergitas dengan program dan kebijakan pemerintah pusat

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun Anggaran 2026 ini masih belum sempurna. Oleh karena itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari *stakeholders* sebagai langkah perbaikan dimasa-masa mendatang sebagai upaya kami untuk meningkatkan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)



Dumai, 10 Oktober 2025  
Kepala Dinas Perhubungan,

SAID EFFENDI, SE., M.M  
Pembina Tk. I  
NIP. 19800201 200604 1 013



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	5
1.4. Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b>	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	7
2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.....	7
2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.....	8
2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.....	15
2.1.4 Faktor-Faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.....	15
2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Perhubungan .....	15
2.1.6 Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.....	16
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	23
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	26
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	29
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	39
<b>BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	41
3.1 Tujuan dan Sarana Renja Perangkat Daerah.....	42
3.3. Program dan Kegiatan.....	43
<b>BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ..</b>	56
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	70
<b>LAMPIRAN</b>	
SK Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun Anggaran 2026 .....	71



## DAFTAR TABEL

Tabel T.C 29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024 Kota Dumai .....	17
Tabel T.C 30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Dumai .....	25
Tabel T.C 31	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kota Dumai .....	31
Tabel T.C 32	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kota Dumai .....	40
Tabel	Tujuan, Sasaran dan IKU Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun Anggaran 2026 .....	42
Tabel T.C 33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kota Dumai.....	46
Tabel	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 .....	57



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2026. Dinas Perhubungan Kota Dumai melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan Renja PD tahun 2026, melalui tahapan-tahapan:

1. Persiapan Penyusunan;
2. Penyusunan Rancangan Akhir;
3. Penyusunan Rancangan;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan Rancangan Akhir; dan
6. Penetapan.



Renja Dinas Perhubungan Kota Dumai adalah penjabaran dari Renstra Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2025 - 2029, yang penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai tahun 2026 serta mendasarkan pada RPJMD Kota Dumai Tahun 2025 - 2029 dan RPJPD Kota Dumai Tahun 2025 - 2045. Selain itu dokumen lain yang dijadikan perhatian dalam penyusunan adalah RPJMN Tahun 2025- 2029 dan Proyek Strategis Nasional dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Renja Dinas Perhubungan Kota Dumai berfungsi sebagai pedoman dan rujukan dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Dumai tahun 2026, dimana pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang direncanakan tetap memperhatikan sinergitas dengan program dan kebijakan Pemerintah Pusat.

Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja Dinas Perhubungan Kota Dumai mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kota Dumai mengingat beberapa hal sebagai berikut

1. Renja Perangkat Daerah merupakan acuan bagi Perangkat Daerah untuk memasukkan program dan kegiatan kedalam KUA-PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada Tahun 2026;
2. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan perangkat daerah untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.



## 1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, payung hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rancangan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 I-5 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 - 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara



- Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomo 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Koedifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
  11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 4 Seri E);
  12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);
  13. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai Tahun 2025-2045;
  14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2025-2029;



15. Peraturan Walikota Dumai Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 17 Seri D);
16. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 55 Tahun 2025 tentang RKPD Kota Dumai Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2025 Nomor 32 Seri D);
17. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 56 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2029 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2025 Nomor 33 Seri D);

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2026 dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan program, kegiatan maupun perencanaan kebutuhan anggaran/pagu indikatif pada Dinas Perhubungan Kota Dumai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2026.

Adapun tujuan kegiatan penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Dumai adalah;

1. Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator dan target, serta pagu indikatif tahun 2026 yang tertuang dalam arahan kebijakan berdasarkan hasil analisa dari evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan;
2. Merumuskan suatu dokumen perencanaan sebagai penjabaran Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2025 – 2029 pada periode Tahun 2026;
3. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2026.



#### **1.4 Sistematikan Penulisan**

Sistematika penulisan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026 ini mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

##### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Berisi tentang reviu terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun 2025, mengacu pada APBD tahun 2025. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah; Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah; Review terhadap Rancangan Awal RKPD; dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

##### **BAB III TUJUAN dan SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Pada Bab ini berisi tentang telaah kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan

##### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Pada Bab ini berisi tentang rencana program dan kegiatan beserta Indikator, Target, dan Pagu Indikatif untuk Tahun 2026 dan Perkiraan maju Tahun 2027

##### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.



## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja Dinas Perhubungan Kota Dumai berdasarkan realisasi kinerja anggaran, dengan cara membandingkan dua data yakni realisasi kinerja dengan rencana aksi Dinas Perhubungan Kota Dumai, evaluasi kinerja Dinas Perhubungan Kota Dumai adalah sebagai berikut:

##### **2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan**

Tahun 2024, ada beberapa sub kegiatan pada Dinas Perhubungan Kota Dumai yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yakni terdapat pada Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), dengan sub kegiatan tersebut sebagai berikut:

a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

Jumlah anggaran pada renja Dinas Perhubungan Kota Dumai sebesar Rp 1.039.950.000,- dengan target kinerja 11 Dokumen, namun realisasi anggaran sebesar Rp 819.950.000,- dengan target kinerja sebanyak 9 Dokumen atau terealisasi 82%. Tidak terpenuhinya target kinerja keluaran yang direncanakan disebabkan keterbatasan anggaran, sehingga 2 dokumen tidak dapat terealisasi di Tahun 2024.

b. Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Jumlah anggaran pada Renja Dinas Perhubungan Kota Dumai sebesar Rp 25.379.074.800,- dengan target kinerja 3000 Unit, namun realisasi anggaran sebesar Rp 23.067.800.000,- dengan target



kinerja keluaran 2705 Unit atau terealisasi 90%. Tidak terpenuhinya target kinerja keluaran yang direncanakan disebabkan keterbatasan anggaran, sehingga penyediaan perlengkapan jalan di Jalan Kota Dumai tidak dapat diakomodir seluruhnya.

- c. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
- Jumlah anggaran pada Renja Dinas Perhubungan Kota Dumai sebesar Rp 28.092.586.000,- dengan target kinerja 198 Unit, namun realisasi anggaran sebesar Rp 26.653.409.000,- dengan target kinerja keluaran 111 Unit atau hanya terealisasi 56%. Tidak terpenuhinya target kinerja keluaran yang direncanakan disebabkan keterbatasan anggaran, sehingga rehabilitasi/pemeliharaan perlengkapan jalan di Jalan Kota Dumai tidak dapat diakomodir seluruhnya.

### **2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan**

#### **a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, melalui kegiatan dan sub kegiatan:**

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah



4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pengadaan Mebel
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pengadaan Aset Tak Berwujud
  - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya



**b. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), melalui kegiatan dan sub kegiatan:**

1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
  - Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
  - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
2. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
  - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
  - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
  - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Penguji Berkala Kendaraan Bermotor
  - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
4. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
  - Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
  - Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
  - Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota



5. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran, berikut ini:

Program/Kegiatan	Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Capaian Renstra	Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Target kinerja keluaran sesuai dengan yang direncanakan	Tercapainya target renstra	Efisiensi alokasi belanja
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Target kinerja keluaran sesuai dengan yang direncanakan	Tercapainya target renstra	Efisiensi alokasi belanja
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Target kinerja keluaran sesuai dengan yang direncanakan	Tercapainya target renstra	Efisiensi alokasi belanja
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Target kinerja keluaran sesuai dengan yang direncanakan	Tercapainya target renstra	Efisiensi alokasi belanja
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Target kinerja keluaran sesuai dengan yang direncanakan	Tercapainya target renstra	Efisiensi alokasi belanja
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Target kinerja keluaran sesuai dengan yang direncanakan	Tercapainya target renstra	Efisiensi alokasi belanja



Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Target kinerja keluaran sesuai dengan yang direncanakan	Tercapainya target renstra	Efisiensi belanja	alokasi
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Target kinerja keluaran sesuai dengan yang direncanakan	Tercapainya target renstra	Efisiensi belanja	alokasi
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Target kinerja keluaran sesuai dengan yang direncanakan	Tercapainya target renstra	Efisiensi belanja	alokasi
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Target kinerja keluaran sesuai dengan yang direncanakan	Tercapainya target renstra	Efisiensi belanja	alokasi
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Target kinerja keluaran sesuai dengan yang direncanakan	Tercapainya target renstra	Efisiensi belanja	alokasi
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Target kinerja keluaran sesuai dengan yang direncanakan	Tercapainya target renstra	Efisiensi belanja	alokasi
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Target kinerja keluaran sesuai dengan yang direncanakan	Tercapainya target renstra	Efisiensi belanja	alokasi
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Target kinerja keluaran sesuai dengan yang direncanakan	Tercapainya target renstra	Efisiensi belanja	alokasi
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Target kinerja keluaran sesuai dengan yang direncanakan	Tercapainya target renstra	Efisiensi belanja	alokasi
Pengadaan Mebel	Target kinerja keluaran sesuai dengan yang direncanakan	Tercapainya target renstra	Efisiensi belanja	alokasi
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Target kinerja keluaran sesuai	Tercapainya target renstra	Efisiensi belanja	alokasi



Pengadaan Aset Tak Berwujud	Target kinerja keluaran sesuai dengan yang direncanakan	Tercapainya target renstra	Efisiensi belanja	alokasi
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Target kinerja keluaran sesuai dengan yang direncanakan	Tercapainya target renstra	Efisiensi belanja	alokasi
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Target kinerja keluaran sesuai dengan yang direncanakan	Tercapainya target renstra	Efisiensi belanja	alokasi
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Target kinerja keluaran sesuai dengan yang direncanakan	Tercapainya target renstra	Efisiensi belanja	alokasi
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Target kinerja keluaran sesuai dengan yang direncanakan	Tercapainya target renstra	Efisiensi belanja	alokasi
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Target kinerja keluaran sesuai dengan yang direncanakan	Tercapainya target renstra	Efisiensi belanja	alokasi
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Target kinerja keluaran sesuai dengan yang direncanakan	Tercapainya target renstra	Efisiensi belanja	alokasi
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Target kinerja keluaran sesuai dengan yang direncanakan	Tercapainya target renstra	Efisiensi belanja	alokasi
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Target kinerja keluaran sesuai dengan yang direncanakan	Tercapainya target renstra	Efisiensi belanja	alokasi
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>				
<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>				
Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Target kinerja keluaran sesuai dengan yang direncanakan	Tercapainya target renstra	Efisiensi belanja	alokasi
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Target kinerja keluaran sesuai	Tercapainya target renstra	Efisiensi belanja	alokasi



Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Target kinerja keluaran sesuai dengan yang direncanakan	Tercapainya target renstra	Efisiensi belanja	alokasi
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Target kinerja keluaran sesuai dengan yang direncanakan	Tercapainya target renstra	Efisiensi belanja	alokasi
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Target kinerja keluaran sesuai dengan yang direncanakan	Tercapainya target renstra	Efisiensi belanja	alokasi
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Target kinerja keluaran sesuai dengan yang direncanakan	Tercapainya target renstra	Efisiensi belanja	alokasi
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Target kinerja keluaran sesuai dengan yang direncanakan	Tercapainya target renstra	Efisiensi belanja	alokasi
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Target kinerja keluaran sesuai dengan yang direncanakan	Tercapainya target renstra	Efisiensi belanja	alokasi
Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Target kinerja keluaran sesuai dengan yang direncanakan	Tercapainya target renstra	Efisiensi belanja	alokasi
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Target kinerja keluaran sesuai dengan yang direncanakan	Tercapainya target renstra	Efisiensi belanja	alokasi
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Target kinerja keluaran sesuai dengan yang direncanakan	Tercapainya target renstra	Efisiensi belanja	alokasi



### **2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan**

Tahun 2024, tidak ada Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja keluaran yang telah direncanakan atau Target kinerja keluaran telah sesuai dengan yang direncanakan sebagaimana tertuang didalam dokumen Renja Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2024

### **2.1.4 Faktor-Faktor Penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan**

1. Adapun faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan adalah sebagai berikut:
  - Keterbatasan anggaran, sehingga target kinerja keluaran yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal artinya adanya penyesuaian terhadap target mengikuti besaran pagu yang telah ditetapkan.
2. Adapun faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan adalah sebagai berikut:
  - Target beserta besaran pagu yang direncanakan telah sesuai dengan kebutuhan, sehingga dalam pelaksanaannya dapat terealisasi dengan baik.

### **2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Perhubungan Kota Dumai**

- Dinas Perhubungan Kota Dumai harus memperhatikan indikator output sub-sub kegiatan yang telah tertuang di dalam dokumen perencanaan (Renja) perangkat daerah, sehingga terjadi keselarasan antara perencanaan dan penganggaran;
- Secara keseluruhan 90% sub kegiatan di Tahun 2024 telah terealisasi sesuai target kinerja yang telah direncanakan.



#### **2.1.6 Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut**

Berdasarkan pemaparan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target dari program/kegiatan/sub kegiatan serta implikasi yang akan timbul, maka dapat diambil beberapa kebijakan sebagai berikut:

- Efisiensi alokasi belanja
- Penyesuaian rincian belanja pada sub - sub kegiatan atas pekerjaan yang mengalami perubahan dilaksanakan saat pergeseran anggaran, sehingga dapat memaksimalkan realisasi pekerjaan tersebut.

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Dinas Perhubungan Kota Dumai dapat dilihat dari tabel T- C. 29 dibawah ini:



**TABEL T-C. 29**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan**  
**Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025**  
**Kota Dumai**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan Tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>										
1.02	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>										
1.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>									
1.02.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>27 Dokumen</b>	<b>11 Dokumen</b>	<b>5 Dokumen</b>	<b>5 Dokumen</b>	<b>100</b>	<b>6 Dokumen</b>	<b>22 Dokumen</b>	<b>81</b>	
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	5 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	9 Dokumen	82	
1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	4 Dokumen	80	
1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 Dokumen	4 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	100	3 Laporan	9 Laporan	82	
1.02.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>20 Laporan</b>	<b>6 Laporan</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>100</b>	<b>7 Laporan</b>	<b>16 Laporan</b>	<b>80</b>	
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/ Bulan	80 Orang /Bulan	80 Orang / Bulan	80 Orang / Bulan	100	90 Orang / Bulan	90 Orang / Bulan	100	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan Tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
1.02.01.2.02.0001	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	4 Laporan	100	
1.02.01.2.02.0001	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100	6 Laporan	12 Laporan	100	
<b>1.02.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>7 Laporan</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>100</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>5 Laporan</b>	<b>71</b>	
1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	7 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	2 Laporan	5 Laporan	71	
<b>1.02.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</b>	<b>58 Orang</b>	<b>26 Orang</b>	<b>12 Orang</b>	<b>12 Orang</b>	<b>100</b>	<b>12 Orang</b>	<b>12 Orang</b>	<b>86</b>	
1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	58 Orang	26 Orang	12 Orang	12 Orang	100	12 Orang	12 Orang	86	
<b>1.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>8 Laporan</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>6 Laporan</b>	<b>6 Dokumen</b>	<b>100</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>6 Dokumen</b>	<b>75</b>	
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	3 Paket	75	
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	2 Paket	4 Paket	57	
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	3 Paket	75	
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	2 Paket	4 Paket	57	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Target Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan Tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	75	
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan	75	
<b>1.02.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1484 Unit</b>	<b>415 Unit</b>	<b>216 Unit</b>	<b>216 Unit</b>	<b>100</b>	<b>369 Unit</b>	<b>993 Unit</b>	<b>67</b>	
1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	2 Unit	4 Unit	80	
1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	882 Unit	232 Unit	103 Unit	103 Unit	100	200 Unit	538 Unit	61	
1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	576 Unit	176 Unit	110 Unit	110 Unit	100	160 Unit	436 Unit	77	
1.02.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	11 Unit	4 Unit	1 Unit	1 Unit	100	2 Unit	7 Unit	64	
1.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dibangun	10 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	100	5 Unit	8 Unit	80	
<b>1.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>100</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>9 Laporan</b>	<b>75</b>	
1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan	75	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan	75	
1.02.01.2.08.0006	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan	75	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan Tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
<b>1.02.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>894 Unit</b>	<b>217 Unit</b>	<b>217 Unit</b>	<b>217 Unit</b>	<b>100</b>	<b>213 Unit</b>	<b>647 Unit</b>	<b>72</b>	
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	144 Unit	35 Unit	38 Unit	38 Unit	100	36 Unit	109 Unit	76	
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	677 Unit	157 Unit	172 Unit	172 Unit	100	160 Unit	489 Unit	72	
1.02.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	7 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100	2 Unit	6 Unit	86	
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	66 Unit	23 Unit	5 Unit	5 Unit	100	15 Unit	43 Unit	65	
<b>2.15.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN AGKUTAN (LLAJ)</b>	<b>Persentase Tersedianya Prasarana Perhubungan Darat yang Layak</b>									
<b>2.15.02.2.01</b>	<b>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</b>	<b>40 Dokumen</b>	<b>18 Dokumen</b>	<b>11 Dokumen</b>	<b>9 Dokumen</b>	<b>82</b>	<b>6 Dokumen</b>	<b>33 Dokumen</b>	<b>80</b>	
2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	40 Dokumen	18 Dokumen	11 Dokumen	9 Dokumen	82	5 Dokumen	32 Dokumen	80	
<b>2.15.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>9.952 Unit</b>	<b>2.912 Unit</b>	<b>3206 Unit</b>	<b>2824 Unit</b>	<b>88</b>	<b>2068 Unit</b>	<b>7804 Unit</b>	<b>78</b>	
2.15.02.2.01.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	18 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100	5 Unit	15 Unit	83	
2.15.02.2.01.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan	7744 Unit	1744 Unit	3000 Unit	2705 Unit	90	1818 Unit	6267 Unit	81	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi target kinerja program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Target Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan Tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
2.15.02.2.01.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	38 Unit	11 Unit	3 Unit	3 Unit	100	5 Unit	19 Unit	50	
2.15.02.2.01.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Jumlah Pemeliharaan Jaringan Listrik dan Penerangan Jalan Umum	2152 Unit	1152 Unit	198 Unit	111 Unit	56	240 Unit	1503 Unit	70	
<b>2.15.02.2.04</b>	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	<b>Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	<b>11 Dokumen</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>100</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>7 Dokumen</b>	<b>64</b>	
2.15.02.2.04.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	7 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	4 Dokumen	57	
2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan	74	
<b>2.15.02.2.05</b>	<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>Jumlah Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>108 Unit</b>	<b>69 Unit</b>	<b>4 Unit</b>	<b>4 Unit</b>	<b>100</b>	<b>4 Unit</b>	<b>87 Unit</b>	<b>81</b>	
2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang tersedia	65 Unit	56 Unit	2 Unit	2 Unit	100	2 Unit	60 Unit	92	
2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	18 Orang	5 Orang	3 Orang	3 Orang	100	2 Orang	10 Orang	56	
2.15.02.2.05.0006	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	25 Unit	13 Unit	2 Unit	2 Unit	100	2 Unit	17 Unit	68	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
2.15.02.2.06	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Dokumen Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>4 Laporan</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>100</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>9 Dokumen</b>	<b>75</b>	
2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	<b>1 Dokumen</b>	<b>100</b>	1 Laporan	3 Laporan	75	
2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	2 Dokumen	67	
2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	5 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Dokumen	4 Dokumen	80	
2.15.02.2.09	<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>4 Laporan</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>100</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>75</b>	
2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan	75	



## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran strategis Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2021-2026, terdapat 4 Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran tersebut pada tahun 2024. Keempat indikator yang dimaksud antara lain:

### **a. Persentase Prasarana Transportasi**

Target indikator sasaran ini dalam renstra Dinas Perhubungan Kota Dumai yaitu 67% dan capaian indikator ini tahun 2024 yaitu 67% atau 100%. Sub Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

### **b. Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum dan Barang**

Target indikator sasaran ini dalam renstra Dinas Perhubungan Kota Dumai yaitu 68% dan capaian indikator ini tahun 2024 yaitu 68% atau 100%. Sub Kegiatan pendukung sasaran yaitu Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

### **c. Persentase Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Target indikator sasaran ini dalam renstra Dinas Perhubungan Kota Dumai yaitu 70% dan capaian indikator ini tahun 2024 yaitu 70% atau 100%. Sub kegiatan pendukung sasaran ini yaitu Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

### **d. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan**

Target indikator sasaran ini dalam renstra Dinas Perhubungan Kota Dumai yaitu 1.198,23 : 94.117 km/unit dan capaian indikator ini tahun 2024 yaitu 1.198,23 : 94.842 km/unit. Sub Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota dan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota



Tabel analisis pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Dumai, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing dapat dilihat pada tabel T-C. 30 sebagai berikut:



Tabel. T-C.30  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Dumai

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan	-	-	68,5%	76,5%	-	-	77,5%	76,5%	-	-	
2.	Persentase Prasarana Transportasi	-	-	67%	78%	-	-	67%	78%	-	-	<i>Kinerja Tercapai sesuai target yang ditetapkan</i>
3.	Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum dan Barang	-	-	68%	75%	-	-	63%	75%	-	-	<i>Kinerja Belum Tercapai dikarenakan rendahnya kesadaran pemilik kendaraan untuk melaksanakan pengujian kendaraan</i>
4.	Persentase Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	-	-	70%	75%	-	-	88%	75%	-	-	<i>Melebihi Capaian Kinerja dikarenakan Jumlah Penyediaan LLAJ melebihi target yang ditetapkan pada tahun berkenaan</i>
5.	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	-	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	1.198,23 km: 94.117 unit	1.198,23 km: 98.424 unit	-	-	1.198,23 km: 96.069 unit	1.198,23 km: 98.424 unit	-	-	<i>Kinerja Belum Tercapai dikarenakan tingginya peningkatan pertumbuhan jumlah kendaraan di kota Dumai</i>
6.	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	-	-	-	-	25%	25%	-	-	25%	25%	
7.	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	-	-	-	-	79%	83%	-	-	79%	83%	
8.	Konektivitas Laut dan sungai	-	-	-	-	20%	40%	-	-	20%	40%	
9.	Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani	-	-	-	-	20%	40%	-	-	20%	40%	

Dumai, 10 Oktober 2025  
Kepala Dinas Perhubungan,



SAID EFFENDI, SE., M.M  
NIP. 19800201 200604 1 013



### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah, terdapat beberapa potensi dan permasalahan yang mungkin timbul dan perlu ditindak lanjuti. Potensi dan permasalahan-permasalahan tersebut perlu diidentifikasi secara tepat untuk menentukan program-program yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Adapun permasalahan yang dihadapi diantaranya:

1. Belum tersedianya terminal penumpang Tipe C sebagai simpul transportasi perkotaan untuk menata trayek angkutan kota dan pedesaan, maka rekomendasi dan catatan yang strategis yaitu memprioritaskan pembangunan terminal penumpang Tipe C melalui program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Kegiatan Pengelolaan Terminal Tipe C, Sub Kegiatan Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Umum dan Fasilitas Penunjang
2. Belum adanya revitalisasi angkutan kota dan angkutan yang tidak memiliki izin (becak motor, kendaraan online) yang dapat merusak trayek dan operasional angkutan kota, maka rekomendasi dan catatan yang strategis yaitu memprioritaskan penetapan jaringan trayek melalui program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Kegiatan penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupate/kota, sub kegiatan penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
3. Masih rendahnya penertiban dan pengendalian angkutan orang dan/atau barang di Kota Dumai, maka rekomendasi dan catatan strategis yaitu memprioritaskan kegiatan pengendalian dan pengawasan angkutan orang dan/atau barang melalui program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), kegiatan



pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota, sub kegiatan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota;

4. Masih belum optimalnya pengelolaan parkir, maka rekomendasi dan catatan strategis yaitu memprioritaskan pengawasan terpadu perparkiran di Kota Dumai dan melakukan sosialisasi perparkiran di tepi jalan umum melalui program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), kegiatan penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, sub kegiatan fasilitasi pemenuhan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten/kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;

Perumusan Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut:

<b>Tupoksi Perangkat Daerah</b>	<b>Permasalahan/Tingkat Kinerja</b>	<b>Tantangan dan Peluang</b>	<b>Dampak/Isu Penting</b>	<b>Rekomendasi</b>
Melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah	Belum tersedianya terminal penumpang Tipe C sebagai simpul transportasi perkotaan	Angkutan umum tergeser dengan adanya transportasi berbasis Online yang semakin menjamur	Keterbatasan penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang mendukung konektivitas antar wilayah	Memprioritaskan pembangunan terminal penumpang tipe C melalui program penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kegiatan Pengelaan Terminal Tipe C, Sub Kegiatan Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Umum dan Fasilitas Penunjang



Melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah	Belum adanya revitalisasi angkutan kota dan angkutan yang tidak memiliki izin (becak motor, kendaraan online)	Trayek angkutan yang tidak tertata dengan baik	Tingginya tingkat penggunaan angkutan pribadi dibandingkan angkutan umum	Memprioritaskan penetapan jaringan trayek melalui program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Kegiatan penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupate/kota, sub kegiatan penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
Melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah	Masih rendahnya penertiban dan pengendalian angkutan orang dan/atau barang di Kota Dumai	Tingkat kepatuhan perusahaan transporter dan pemilik barang masih rendah	Tingginya pelanggaran <i>Over Dimension Over Loading</i> (ODOL) sebagai salah satu penyebab kerusakan jalan yang berdampak kepada keselamatan pengguna jalan	Memprioritaskan kegiatan pengendalian dan pengawasan angkutan orang dan/atau barang melalui program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), kegiatan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota, sub kegiatan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota
Melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah	Masih belum optimalnya pengelolaan parkir	Sistem Perparkiran di tepi jalan umum yang tidak tertata dengan baik sehingga menimbulkan kemacetan di jam-jam sibuk	Belum tertatanya sistem perparkiran di tepi jalan umum	Memprioritaskan pengawasan terpadu perparkiran di Kota Dumai dan melakukan sosialisasi perparkiran di tepi jalan umum melalui program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), kegiatan penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, sub kegiatan fasilitasi pemenuhan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten/kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik



#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rancangan Awal RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Awal (ranwal) renja perangkat daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Rancangan Awal renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Penyusunan Rancangan Awal renja mengacu pada rencana strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2025 - 2029, pada tahun 2026 Dinas Perhubungan Kota Dumai merencanakan untuk melaksanakan sebanyak 4 (empat) Program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan dengan mempertimbangkan perkembangan permasalahan lingkungan yang dihadapi. Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rancangan Awal rencana kerja Tahun 2026, yaitu:



Tabel. T-C.31  
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026  
Kota Dumai

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan Kota Dumai

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	<b>PERHUBUNGAN</b>					<b>PERHUBUNGAN</b>					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perhubungan	100%	17.704.457.500	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perhubungan	100%	33.426.142.205	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	45,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	30,655,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	15,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	11,400,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Dumai	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	15,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Dumai	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7,500,000	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	15,000,000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	11,765,000	



	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>9.988.116.980</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>26.214.404.532</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Dumai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	82 Orang	9.958.116.980	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Dumai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	350 Orang	26.187.004.532	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	15,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	14,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	15,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	13,400,000	
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>15,000,000</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>7,500,000</b>	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	15,000,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	7,500,000	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</b>	<b>10 Orang</b>	<b>50,000,000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>0 Orang</b>	<b>0</b>	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Dumai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	50,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Dumai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0	



Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 Dokumen	550,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 Dokumen	637.568.500	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Dumai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Dumai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Dumai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Dumai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	112.317.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Dumai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	50,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Dumai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	35.550.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Dumai	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	100,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Dumai	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	66.341.500	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	50,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	25.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	200,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	348.360.000	
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>20 Unit</b>	<b>100,000,000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>0 Unit</b>	<b>0</b>	
Pengadaan Mebel	Kota Dumai	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	50,000,000	Pengadaan Mebel	Kota Dumai	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	50,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	



	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>5,954,340,520</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>5.597.329.373</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.750.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1,450,340,520	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.220.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4,500,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4.375.579.373	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>139 Unit</b>	<b>1,002,000,000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>133 Unit</b>	<b>938.674.800</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Dumai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38 Unit	702,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Dumai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	448.664.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	200,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	97 Unit	490.010.800	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0	



	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>		<b>Persentase Tersedianya Prasarana Perhubungan Darat yang Layak</b>	<b>95%</b>	<b>20,316,731,439</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>		<b>Persentase Tersedianya Prasarana Perhubungan Darat yang Layak</b>	<b>95%</b>	<b>20.958.167.000</b>	
	<b>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan Kabupaten/Kota</b>	<b>5 Dokumen</b>	<b>550,000,000</b>	<b>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan Kabupaten/Kota</b>	<b>0 Dokumen</b>	<b>0</b>	
	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	5 Dokumen	500,000,000	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0	
	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Penetapan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50,000,000	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Penetapan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0	
	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>205 Unit</b>	<b>17,506,731,439</b>	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>181 Unit</b>	<b>18.866.786.000</b>	
	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	1 Unit	500,000,000	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	0 Unit	0	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	100 Unit	706,731,439	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	75 Unit	813.750.000,00	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Kota Dumai	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	4 Unit	100,000,000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Kota Dumai	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	0 Unit	0	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kota Dumai	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	100 Unit	16,200,000,000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kota Dumai	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	106 Unit	18.053.036.000	



	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	2 Dokumen	300,000,000	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	1 Dokumen	204.000.000	
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	200,000,000	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0 Dokumen	0	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	100,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	204.000.000	
	<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>		<b>Jumlah Dokumen/Laporan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>125,000,000</b>	<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>		<b>Jumlah Dokumen/Laporan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>87.000.000</b>	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Dumai	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	2 Unit	50,000,000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Dumai	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	0 Unit	0	
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Dokumen	25,000,000	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Dokumen	75.000.000	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Dumai	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	10 Unit	50,000,000	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Dumai	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	12 Unit	12.000.000	



	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah Dokumen/Laporan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>200,000,000</b>	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah Dokumen Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>654.519.000</b>	
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	200,000,000	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	354.519.000	
	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Kota Dumai	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	-	-	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Kota Dumai	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	2 Unit	100.000.000	
	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kota Dumai	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan pengadaan dan pemasangan	-	-	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kota Dumai	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan pengadaan dan pemasangan	1 Dokumen	100.000.000	
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	100.000.000	
	<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah Laporan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>1,635,000,000</b>	<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah Laporan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>1.145.862.000</b>	



	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	1,200,000,000	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	450.000.000	
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	435,000,000	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	695.862.000	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>		<b>Persentase Tersedianya Prasarana Perhubungan Laut yang Layak sesuai Kewenangan Kota</b>		-	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>		<b>Persentase Tersedianya Prasarana Perhubungan Laut yang Layak sesuai Kewenangan Kota</b>	20%	<b>8,000,000,000</b>	
	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal		Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal		-	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal		Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	1 Dokumen	100,000,000	
	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	-	-	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	1 Dokumen	100,000,000	



	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN</b>		Persentase Penyediaan Rencana Induk Infrastruktur Perkeretaapian yang Terintegrasi sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	50,000,000	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN</b>		Persentase Penyediaan Rencana Induk Infrastruktur Perkeretaapian yang Terintegrasi sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100,000,000	
	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian		Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian	1 Dokumen	50,000,000	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian		Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian	1 Dokumen	100,000,000	
	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian	1 Dokumen	50,000,000	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian	1 Dokumen	100,000,000	
<b>TOTAL</b>					<b>38.071.188.939</b>	<b>TOTAL</b>					<b>54.584.309.205</b>



Dumai, 10 Oktober 2025  
Kepala Dinas Perhubungan,

SAID EFFENDI, SE., M.M  
Pembina Tk. I  
NIP. 19800201 200604 1 013



## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Ketentuan pada pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamankan suatu proses pelaksanaan Musyarawah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kepada Pemerintah Daerah. Proses penyelenggaraan Musrenbang tersebut haruslah bersifat partisipatif, akuntabel, transparan dengan menekankan pentingnya mendorong keterlibatan seluruh *stakeholders*.

Dalam proses perencanaan perlu dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang yaitu melalui musrenbang tingkat kelurahan, musrenbang tingkat kecamatan dan musrenbang tingkat kota. Dari hasil pelaksanaan musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat atau para pemangku kepentingan.

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat terhadap Program/Kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Asosiasi-asosiasi dan Perguruan Tinggi ada usulan yang ditujukan kepada Dinas Perhubungan Kota Dumai.

Usulan yang disampaikan pada saat pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di tingkat Kelurahan dan seterusnya sampai pada tingkat Kecamatan berkaitan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Dumai yang diakomodir nantinya akan dituangkan pada Tabel T.C-32 berikut:



**Tabel T-C.32**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026**  
**Kota Dumai**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	<p>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</p> <p>Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</p>	<p>Jl. M. Syukur RT 011,  Kelurahan Pelintung,  Kec. Medang Kampai</p>	<p>Persentase Tersedianya Prasarana Perhubungan Darat yang Layak</p> <p>Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</p>	8 Unit	



### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional**

Adapun Prioritas Nasional Tahun 2026 yakni :

1. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
2. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;
3. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
4. Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
5. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;
6. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas;
7. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur;
8. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan.

Jika dikaitkan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Dumai, maka termasuk mendukung Prioritas Nasional Kedua yakni ***“Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi”***.



### 3.2 Tujuan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah, Dinas Perhubungan Kota Dumai memiliki kewenangan untuk memenuhi **Misi Kedua RPJMD Kota Dumai Tahun 2025 - 2029** yaitu **“Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan”**

Adapun tujuan, sasaran dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ingin dicapai Dinas Perhubungan Kota Dumai pada Tahun 2025 sebagaimana yang tertuang dalam Renstra DISHUB Tahun 2025-2029, adalah sebagai berikut:

#### Tujuan, sasaran dan IKU Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun Anggaran 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target
1.	Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau	Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pengelolaan Pelayaran, dan Perkeretaapian	Rasio konektivitas	25%
			Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	79%
			Konektivitas Laut dan sungai	20%
			Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani	20%



### 3.3 Program dan Kegiatan

Rencana kerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis yang disusun. Di dalam proses rencana kerja, Dinas Perhubungan Kota Dumai mendefinisikan seluruh Sasaran Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang akan diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan dan dituangkan dalam dokumen rencana kerja. Pada dokumen rencana kerja dijabarkan dan ditetapkan target kinerja tahunan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi Dinas Perhubungan Kota Dumai untuk mencapainya dalam satu tahun, dan merupakan tolok ukur (*benchmarks*) bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Rancangan Rencana Kerja ini merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2026. Dengan demikian pada tahap penginputan RKA harus sesuai dan selaras dengan Rancangan Rencana Kerja, baik program, kegiatan maupun pagu indikatifnya. Karena jika saat penginputan RKA mengusulkan program atau kegiatan yang baru dan tidak ada di Rancangan Rencana Kerja maka Program dan Kegiatan tersebut tidak akan muncul di system atau ditolak system. Dengan kata lain program dan kegiatan tersebut tidak akan bisa dianggarkan.

Faktor-faktor yang menjadi bahan rumusan pada Rencana Kerja Tahun 2026 pada Dinas Perhubungan Kota Dumai berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis yang terdapat dalam Dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kota Dumai T.A 2025 - 2029.

Pada Renja Tahun 2026, Dinas Perhubungan Kota Dumai mempunyai 4 Program 13 kegiatan dan 31 sub kegiatan yang terdiri dari 1 (satu) Program Non Urusan yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan 3 (tiga) Program Urusan yakni Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Program Pengelolaan Pelayaran, dan Program Pengelolaan



Perkeretaapian. Dimana kelompok sasarannya yakni ASN Dinas Perhubungan Kota Dumai untuk Program Non Urusan dan Masyarakat Kota Dumai untuk 3 (tiga) Program Urusan dengan total kebutuhan dana/pagu indikatif yakni sebesar Rp 101.526.695.040,00 bila dirinci sebagai berikut:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan sumber dana “Pendapatan Asli Daerah (PAD)” sebesar Rp 33.426.142.205,00;
- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan sumber dana “Dana Bagi Hasil (DBH)” sebesar Rp 20.958.167.000,00;
- Program Pengelolaan Pelayaran dengan sumber dana “Dana Bagi Hasil (DBH)” sebesar Rp 100.000.000,00 ; dan
- Program Pengelolaan Perkeretaapian dengan sumber dana “Dana Bagi Hasil (DBH)” sebesar Rp 100.000.000,00

Dinas Perhubungan Kota Dumai memiliki tujuan Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau, dengan Indikator keberhasilan rasio konektivitas, dengan sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pengelolaan Pelayaran, dan Perkeretaapian, dengan indikator sasaran :

1. Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal, adapun Program untuk mencapai indikator sasaran tersebut sebagai berikut:

➤ Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), dengan Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan Kabupaten/Kota yang memiliki sub kegiatan sebagai berikut:

- ✚ Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
- ✚ Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan



2. Konektivitas Laut dan sungai, adapun Program untuk mencapai sasaran tersebut sebagai berikut:
  - Program Pengelolaan Pelayaran, dengan Kegiatan Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal yang memiliki sub kegiatan sebagai berikut:
    - ✚ Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal
  
3. Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani, adapun Program untuk mencapai sasaran tersebut sebagai berikut:
  - Program Pengelolaan Perkeretaapian, dengan Kegiatan Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian yang memiliki sub kegiatan sebagai berikut:
    - ✚ Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian

Adapun rincian Rencana program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun Anggaran 2026 sebagaimana terlihat pada tabel T-C.33 sebagai berikut:



**Tabel T-C.33**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026**  
**dan Prakiraan Maju Tahun 2027**  
**Kota Dumai**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan Kota Dumai

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>									
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>									
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan		100%	33.426.142.205,00				38.092.550.332,00
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6 Dokumen	30.665.000,00				31.500.000,00
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Dumai	2 Dokumen	11.400.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		12.000.000,00
1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Dumai	1 Dokumen	7.500.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		7.500.000,00
1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Dumai	3 Laporan	11.765.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		12.000.000,00



1.02.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah</b>		<b>3 Dokumen</b>	<b>26.214.404.532,00</b>				<b>29.110.904.520,00</b>
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Dumai	350 Orang	26.187.004.532,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		29.083.504.520,00
1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Dumai	1 Laporan	14.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		14.000.000,00
1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Dumai	2 Laporan	13.400.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		13.400.000,00
1.02.01.2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>1 Dokumen</b>	<b>7.500.000,00</b>				<b>7.500.000,00</b>
1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Dumai	1 Laporan	7.500.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		7.500.000,00
1.02.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>2 Dokumen</b>	<b>637.568.500,00</b>				<b>1.210.000.000,00</b>
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Dumai	1 Paket	50.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		75.000.000,00



1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket dan Kantor yang Disediakan	Kota Dumai	1 Paket	112.317.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	160.000.000,00
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan yang Disediakan	Kota Dumai	1 Paket	35.550.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	50.000.000,00
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang dan yang Disediakan	Kota Dumai	1 Paket	66.341.500,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	250.000.000,00
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kota Dumai	1 Dokumen	25.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	75.000.000,00
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Dumai	1 Laporan	348.360.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	600.000.000,00
<b>1.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>3 Laporan</b>	<b>5.597.329.373,00</b>			<b>5.893.971.012,00</b>
1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Dumai	1 Laporan	1.750.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	3.000.000,00
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Dumai	1 Laporan	1.220.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	1.220.000.000,00
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Dumai	1 Laporan	4.375.579.373,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	4.670.971.012,00



1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Penunjang Pemerintahan Daerah	Unit Barang Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	133 Unit	938.674.800,00				3,600,000,000
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pemeliharaan, dan Kendaraan Operasional Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Dumai	36 Unit	448.664.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		798.664.000,00
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Dumai	97 Unit	490.010.800,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		1.040.010.800,00
2.15.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal</b>		<b>79 %</b>	<b>20.958.167.000,00</b>				<b>36.913.750.000,00</b>
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		181 Unit	18.866.786.000,00				33.263.750.000,00
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kota Dumai	75 Unit	813.750.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)	Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah		10.013.750.000,00
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Kota Dumai	106 Unit	18.053.036.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)	Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah		23.250.000.000,00
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		1 Dokumen	204.000.000,00				300.000.000,00



2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Dumai	1 Laporan	204.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	1 Laporan	300.000.000,00
<b>2.15.02.2.05</b>	<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>Jumlah Dokumen/Laporan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>		<b>1 Dokumen</b>	<b>87.000.000,00</b>				<b>700.000.000,00</b>
2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Dumai	1 Dokumen	75.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)	-		200.000.000,00
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Kota Dumai	12 Unit	12.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)	-		500.000.000,00
<b>2.15.02.2.06</b>	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Dokumen Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>		<b>3 Laporan</b>	<b>654.519.000,00</b>				<b>1.450.000.000,00</b>
2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kota Dumai	1 Laporan	354.519.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)	-		1.000.000.000,00
2.15.02.2.06.0013	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Kota Dumai	2 Unit	100.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)	-		100.000.000,00
2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan pemasangan	Kota Dumai	1 Dokumen	100.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)	-		200.000.000,00



2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Dumai	1 Laporan	100.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	150.000.000,00
2.15.02.2.09	<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>1 Laporan</b>	<b>1.145.862.000,00</b>			<b>1.200.000.000,00</b>
2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan dan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan dan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kota Dumai	1 Laporan	450.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)	Pengentasan Kemiskinan	400.000.000,00
2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kota Dumai	1 Unit	695.862.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	800.000.000,00
2.15.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>	<b>Persentase Tersedianya Prasarana Perhubungan Laut yang Layak sesuai Kewenangan Kota</b>		<b>20%</b>	<b>100,000,000,00</b>			<b>800,000,000,00</b>
2.15.03.2.12	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Loka	Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal			100,000,000,00		-	800,000,000,00



2.15.03.2.10.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kota Dumai	1 Dokumen	100,000,000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	800,000,000,00
2.15.05	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN</b>	<b>Persentase Penyediaan Rencana Induk Infrastruktur Perkeretaapian yang Terintegrasi sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>		20%	100,000,000,00			500,000,000,00
2.15.05.2.01	<b>Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian</b>	<b>Jumlah Dokumen/Laporan Rencana Induk Perkeretaapian</b>			100,000,000,00			500,000,000,00
2.15.05.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian		1 Dokumen	100,000,000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)		500,000,000,00
					<b>54.584.309.205,00</b>			<b>76.306.300.332,00</b>



Dumai, 10 Oktober 2025  
Kepala Dinas Perhubungan

SAID EFFENDI, SE., M.M  
Pembina Tk. I  
NIP. 19800201 200604 1 013



#### **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2026 berisi program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Dumai untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun pemenuhan pelayanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah yang telah disesuaikan dan ditetapkan pada Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:



**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026  
dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kota Dumai**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>						<b>54.584.309.205,00</b>							<b>76.306.300.332,00</b>		
	<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						<b>54.584.309.205,00</b>							<b>76.306.300.332,00</b>		
	<b>2.15</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>						<b>54.584.309.205,00</b>							<b>76.306.300.332,00</b>		
1.	<b>2.15.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>						<b>33.426.142.205,00</b>						-	<b>38.092.550.332,00</b>		
		[ Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan ]	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	100	100	100	100	<b>33.426.142.205,00</b>	-	-	-	-	-	-	<b>38.092.550.332,00</b>	-	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				6 Dokumen	30.665.000,00					ASN Dinas Perhubungan	-	31.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2 Dokumen	11.400.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perhubungan		12.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1 Dokumen	7.500.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perhubungan		7.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					3 Laporan	11.765.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perhubungan		12.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				3 Laporan	26.214.404.532,00					ASN Dinas Perhubungan	-	29.110.904.520,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					350 Orang/bulan	26.187.004.532,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Dinas Perhubungan		29.083.504.520,00	DINAS PERHUBUNGAN



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	14.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perhubungan		14.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				2 Laporan	13.400.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perhubungan		13.400.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	-			1 Laporan	7.500.000,00			-	-	ASN Dinas Perhubungan	-	7.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	7.500.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perhubungan		7.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	-			2 Dokumen	637.568.500,00			-	-	ASN Dinas Perhubungan	-	1.210.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	50.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perhubungan		75.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	112.317.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perhubungan		160.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	35.550.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perhubungan		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	66.341.500,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perhubungan		250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	25.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perhubungan		75.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	348.360.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perhubungan		600.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			3 Laporan	5.597.329.373,00			-	-	ASN Dinas Perhubungan	-	5.893.971.012,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	1.750.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perhubungan		3.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	1.220.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perhubungan		1.220.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	4.375.579.373,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perhubungan		4.670.971.012,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			133 Unit	938.674.800,00			-	-	ASN Dinas Perhubungan	-	1.838.674.800,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				36 Unit	448.664.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perhubungan		798.664.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				97 Unit	490.010.800,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perhubungan		1.040.010.800,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	2.15.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>						<b>20.958.167.000,00</b>						-	<b>36.913.750.000,00</b>	
		[ Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat ]	<b>Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal</b>	<b>90</b>	<b>73</b>	<b>77</b>	<b>79</b>	<b>20.958.167.000,00</b>	-	-	-	-	-	-	<b>36.913.750.000,00</b>	-



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>	-			181 Unit	18.866.786.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Masyarakat Kota Dumai	-	33.263.750.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>				75 Unit	813.750.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Masyarakat Kota Dumai		10.013.750.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara</i>				106 Unit	18.053.036.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Masyarakat Kota Dumai		23.250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	<i>Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</i>	-			1 Dokumen	204.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Masyarakat Kota Dumai	-	300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota														





NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>				1 Dokumen	75.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Masyarakat Kota Dumai		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara</i>				12 Unit	12.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Masyarakat Kota Dumai		500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen/Laporan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</i>	-			3 Laporan	654.519.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Masyarakat Kota Dumai	-	1.450.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota</i>				1 Laporan	354.519.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Masyarakat Kota Dumai		1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0013	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)</i>				2 Unit	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFO RMASI EKONOMI 3. PENING KATAN EKONOMI DAN KESE JAHTERAA N MASYAR AKAT	Masyarakat Kota Dumai		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas														
			<i>Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFO RMASI EKONOMI 3. PENING KATAN EKONOMI DAN KESE JAHTERAA N MASYAR AKAT	Masyarakat Kota Dumai		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, meng embangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFO RMASI EKONOMI 3. PENING KATAN EKONOMI DAN KESE JAHTERAA N MASYAR AKAT	Masyarakat Kota Dumai		150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	-			1 Laporan	1.145.862.000,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, meng embangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFO RMASI EKONOMI 3. PENING KATAN EKONOMI DAN KESE JAHTERAA N MASYAR AKAT	Masyarakat Kota Dumai	-	1.200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i>				1 Laporan	450.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Masyarakat Kota Dumai		400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>				1 Unit	695.862.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Masyarakat Kota Dumai		800.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
3.	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN						100.000.000,00						-	800.000.000,00	
		[ Meningkatkan kualitas layanan transportasi laut dan sungai ]	Konektivitas Laut dan Sungai	100	0	0	20	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	800.000.000,00	-



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.03.2.10	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	<i>Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal</i>	-			1 Dokumen	100.000.000,00			-	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Masyarakat Kota Dumai	-	800.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.10.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Masyarakat Kota Dumai		800.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
4.	2.15.05	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN</b>						<b>100.000.000,00</b>						-	<b>500.000.000,00</b>	
		[ Meningkatkan pengelolaan perlintasan kereta api ]	<b>Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>100.000.000,00</b>	-	-	-	-	-	-	<b>500.000.000,00</b>	-
	2.15.05.2.01	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	<i>Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian</i>	-			1 Dokumen	100.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFORMASI EKONOMI 3. PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Masyarakat Kota Dumai	-	500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.05.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, meng mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TRANSFO RMASI EKONOMI 3. PENING KATAN EKONOMI DAN KESE JAHTERAA N MASYAR AKAT	Masyarakat Kota Dumai		500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
<b>J U M L A H</b>															<b>76.306.300.332,00</b>	

54.584.309.205,00

76.306.300.332,00



Dumai, 10 Oktober 2025  
Kepala Dinas Perhubungan,

SAID EFFENDI, SE., M.M  
Pembina Tk. I  
NIP. 19800201 200604 1 013



## **BAB V PENUTUP**

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Dumai yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026 sebagai bentuk rencana implementasi dari RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2021-2026. Berbagai indikasi program dan kegiatan telah disusun sebagai upaya menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai pelayan masyarakat yang berkaitan dengan pembangunan di Kota Dumai.

Beberapa hal yang menjadi catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian pada Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun Anggaran 2026 antara lain:

1. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kota Dumai;
2. Usulan masyarakat dalam musrenbang tingkat Kelurahan dan Kecamatan;
3. Kegiatan yang belum terakomodir pada Renja Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2026 dikarenakan keterbatasan anggaran.

Kaidah-kaidah pelaksanaan dalam pencapaian sasaran dan tujuan program/kegiatan bergantung pada tingkat koordinasi, kolaborasi, dan komitmen dari seluruh elemen terkait, yang implementatif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Rencana tindak lanjut berupa peningkatan kapasitas sumber daya manusia; Peningkatan koordinasi lintas sektor dan juga antar bidang; Peningkatan koordinasi horizontal dengan perangkat daerah pelaksana Urusan Pekerjaan Umum dan koordinasi vertikal dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.



Dumai, 10 Oktober 2025  
Kepala Dinas Perhubungan,

**SAID EFFENDI, SE., M.M**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19800201 200604 1 013



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
Jl. H. R. Soebrantas No. 135 Dumai Telp / Fax (0765) 31152  
**DUMAI**

KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI

NOMOR 50 /KPTS-DISHUB/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA DUMAI TAHUN ANGGARAN 2026

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2026, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Dumai tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 - 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri No.050.5889. tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 4 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 1 Seri E)
13. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor Seri
14. Peraturan Walikota Dumai Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 17 Seri D);
15. Peraturan Walikota Dumai Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 22 Seri E)

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI TAHUN ANGGARAN 2026
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Dumai dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini memiliki tugas sebagai berikut:
1. Mengkoordinasikan dengan pihak terkait serta menghimpun bahan-bahan dan data guna penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2026;
  2. Menyusun jadwal kerja kegiatan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2026 sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja yang telah disusun;
  4. Menyusun rancangan awal Rencana Kerja;
  5. Menyusun rancangan akhir Rencana Kerja yang selaras dengan Rancangan RKPD Kota Dumai Tahun 2026.



- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal Januari 2025

a.n. WALIKOTA DUMAI  
KEPALA,



**SAID EFFENDI, SE. M.M**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19800201 200604 1 013



LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI  
 NOMOR 50 /KPTS-DISHUB/2025  
 TANGGAL JANUARI 2025  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS  
 PERHUBUNGAN KOTA DUMAI TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI  
 TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Said Effendi, SE	Kepala Dinas Perhubungan	Ketua
2.	Alif Sujud, S.Sos	Sekretaris	Sekretaris
3.	Tri Nanda Putra, ST	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
4.	T. Supriansah, S.Sos., M.Si	Kepala Bidang Prasarana	Anggota
5.	Jumadi, S.Sos., M.IP	Kepala Bidang Lalu Lintas	Anggota
6.	Faisal Ardyan, ST	Kepala Bidang Angkutan dan Sarana	Anggota
7.	Suryanto, S.Sos., M.A.P	Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Anggota
8.	Yuli Rizkiah Putri. S, S.A.P	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
9.	Alik Sofa, ST	TKPK Subbag Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
10.	Diana Azthoria, SH	TKPK Subbag Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
11.	T. M. Umam Syafra, SE	TKPK Subbag Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
12.	Said Muhammad Zakir, SE	TKPK Subbag Perencanaan dan Evaluasi	Anggota

Ditetapkan di Dumai  
 pada tanggal Januari 2025

a.n. WALIKOTA DUMAI  
 KEPALA,



**SAID EFFENDI, SE., M.M**

Pembina Tk. I

NIP. 19800201 200604 1 013